

PENERAPAN AKAD RAHN PADA PT. BANK SYARIAH

MANDIRI CABANG DUMAI

LAPORAN AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensif

Ahli Madya Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

JOHAN

00926007597

JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1433/2012

ABSTRAK

Laporan Akhir ini berjudul : **“Penerapan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.”**

Laporan ini adalah penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Dumai yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 162 Kota Dumai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Respon Nasabah Terhadap Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, bagaimana Respon Nasabah Terhadap tatacara perhitungan biaya pada Akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dan barang apa saja yang bisa digadaikan dengan menggunakan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Respon Nasabah Terhadap Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, untuk mengetahui bagaimana Respon Nasabah Terhadap tatacara perhitungan biaya Akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dan untuk mengetahui barang apa saja yang bisa digadaikan dengan menggunakan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

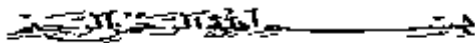
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor CabangDumai, Pengumpulan dokumen-dokumen dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Dumai, Content Analisis (Menganalisa Isi Buku). Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pimpinan dan para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Dumai dan objeknya adalah “Penerapan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/I bagian Officer Gadai dan pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Kemudian 5 nasabah dari 919 nasabah pada bulan Agustus 2010 yang menggunakan Akad Rahn dengan Teknik Random Sampling.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam menerapkan Akad Rahn secara umum sesuai dengan Hukum Islam. Maksudnya setiap prosedur, tatacara perhitungan biaya, baik biaya administrasi dan pemeliharaan sudah sesuai dengan prinsip syari’ah tidak adanya unsure riba di dalam biaya yang diterapkan. Tetapi masih kurangnya Sosialisasi yang di lakukan oleh pihak bank. Ini terlihat dari masih kurangnya pengetahuan nasabah terhadap Prosedur dan Tatacara Perhitungan Biaya-biaya yang di Bebankan ke Nasabah. barang yang bisa digadaikan yaitu berupa Emas yang dibolehkan brerdasarkan Prinsip Rahn. Terlihat di Fatwa Dewan Syari’ah

Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Gadai emas dan di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai ada namanya Opini Dewan Pengawas Syariah BSM tentang Gadai Emas BSM. ini juga yang menguatkan Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk gadai Emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu adanya keluhan dari nasabah yang mengatakan kurangnya produk-produk gadai yang di tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

Setelah mengadakan penelitian dengan megumpulkan data dan menganalisis data-data yang diperoleh, maka dapat penulis jelaskan bahwa pada dasarnya keberadaan Bank Syariah yang ada pada saat sekarang ini membantu masyarakat khususnya nasabah Gadai Emas yang ingin mendapatkan biaya yang cepat, mudah dan aman. Dengan demikian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank melakukan analisa terhadap calon nasabah Gadai.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas Akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini berjudul ***“PENERAPAN AKAD RAHN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI”*** merupakan suatu penelitian yang berbentuk lapangan.

Tugas Akhir ini dapat terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang Tua penulis Ibunda tercinta Rosyidah dan ayah tercinta Markias Zaidun, serta Abang-Abang penulis Salman, Ardiansyah, dan Adik Penulis Rafsanjani yang sangat besar sumbangsihnya dalam memotivasi dan mendoakan keberhasilan penulisan serta dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu dekan.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Prodi D3 Perbankan Syari’ah.

5. Bapak Kamiruddin, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu sampai terselesainya laporan akhir ini.
6. Bapak Raden Mukhtar dan Keluarga yang telah memberikan motifasi kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini.
7. Pimpinan PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Dumai beserta karyawan dan karyawan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Dumai yang telah membantu memberikan informasi dan data untuk menyempurnakan Laporan Akhir ini.
8. Sdri. Radna Tarias Tuti yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini samapi dengan selesainya.
9. Sahabat-sahabat Khususnya dan Teman-teman di Jurusan D3 Perbankan Syari'ah yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penting dalam penyelesaian dan penyempurnaan penelitian ini. Akhirnya, besar kiranya harapan penulis semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Juli 2012

JOHAN

DAFTAR TABEL

Tabel. IV. I Kewenangan Memutus Pembiayaan	54
Tabel. IV. II Surat Peringatan Jatuh Tempo	59
Tabel. IV. III Tabel Kadar/Kekuatan Emas	67
Tabel. IV. IV Alat Pembantu Menaksir Emas dan Jenis, Fungsinya.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dalam hukum Syara' dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengonsumsi dan mengembangkan) harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Syariat islam adalah sebuah system yang mencakup seluruh permasalahan kehidupan.¹

Umumnya masyarakat ekonomi lemah di dalam aktifitas sehari-hari tidak mempunyai uang yang cukup untuk digunakan sebagai modal usaha atau untuk keperluan lainnya yang mendesak dan harus didapatkan dalam waktu yang sangat singkat.² Pada kenyataannya banyak anggota masyarakat yang terpaksa meminta bantuan kepada pihak rentenir untuk mendapatkan sejumlah uang, walaupun untuk pengembaliannya harus dibarengi dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi. Oleh karna itu bank syariah berperan sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya

¹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 32

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.³

Definisi bank yang dapat diperlakukan di Negara kita adalah sesuai dengan aturan yang ada yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 tentang perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Menurut undang-undang tersebut Bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Lembaga keuangan termasuk bank telah banyak disekitar masyarakat. Namun, untuk jumlah Bank Syariah yang ada disekitar masyarakat masih relative sedikit, tetapi perkembangan lembaga-lembaga keuangan lembaga syariah, baik perbankan maupun non perbankan tergolong cepat. Hal ini karna munculnya kesadaran umat bahwa ajaran islam mengandung ajaran yang universal, tidak hanya berkuat pada dimensi ritual-lisme belaka, tetapi juga unsure duniawi (Muamalah) tak terpisahkan, sebagai wujud agama yang rahmatan Lil alamien. Kesadaran pemahaman inilah yang berdampak pada sebagai masyarakat muslim bahwa system perbankan konvensional itu mengandung unsur riba dan system bunga ini yang perlu dihapuskan.⁵

Dengan berdirinya Bank-Bank Syariah di Indonesia tujuannya untuk menghilangkan perekonomian yang ribawi dan perbankan dengan system bunga, system ini diganti dengan system mudharabah atau bagi hasil dan tujuannya adalah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan menghilangkan system bunga. Demikian pula dengan PT. Bank Syariah Cabang Dumai juga menggunakan jasa gadai syariah.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1

⁴ Ade Arthesa dk, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Bandung: Gramedia, 2008), Cet. Pertama, h. 6. M.

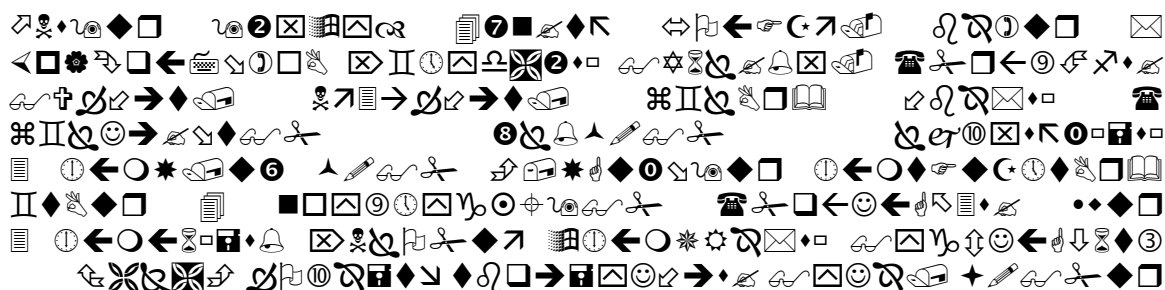
⁵ Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2003), CET Pertama, h. 110.

Gadai dilihat dari sisi fiqih disebut “Ar-Rahn” yaitu suatu akad (perjanjian) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang milik sendiri sebagai tanggungan hutang.⁶ ada juga yang berpendapat bahwa rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁷

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada akikatnya adalah kewajiban pihak yang mengadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung *rahin*.⁸

Tujuan akad *Rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan.⁹

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:



Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

⁶ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1339

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 108

⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 245

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.

¹⁰ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), h. 71

Ayat di atas mengandung prinsip bahwa, bila diperlukan, dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan.

Adapun yang melatar belakangi Bank Syariah Mandiri menyediakan produk gadai adalah banyaknya minat nasabah, sebagai inovasi produk, serta ingin berkompetisi dengan bank-bank Syariah lainnya.

Gadai yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah gadai emas dimana seorang nasabah melakukan gadai emas yang dimilikinya untuk memperoleh pembiayaan ataupun dana dari pihak bank dan bank akan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut sesuai dengan ukuran emasnya. Dan nasabah membayar biaya administrasi dan pemeliharaan emas yang digadaikan. System gadai emas sangat mempermudah nasabah yang apabila ada kebutuhan yang mendesak yang sebenarnya bias kita atasi dengan mudah pada waktu mendatang.

Investasi emas yang diterapkan pada PT. bank Syariah Mandiri adalah suatu investasi dimana seorang nasabah melakukan investasi dengan membawa emas batangan dengan maksud untuk menginvestasikan kepada bank tersebut. Salah satu keuntungan dari investasi emas tersebut adalah banyaknya fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat kita gunakan sewaktu-waktu, misalnya menyambut liburan dan menyambut hari-hari penting lainnya. Melihat dari banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan dana secara mudah dan cepat inilah yang melandasi PT, Bank Syariah Mandiri meluncurkan pembiayaan gadai emas. Disediakkannya dana untuk pembiayaan gadai oleh PT. Bank Syariah Mandiri mempermudah nasabah untuk mendapatkan dana secara lebih mudah.

Produk gadai emas ini diperuntukan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah, tetapi masih banyaknya nasabah yang belum mengetahui produk ini, tetapi PT. Bank Syariah Mandiri terus berusaha mengenalkan produk gadai emas BSM kepada masyarakat. Adapun mekanisme persyaratan program ini nasabah mengisi formulir, kartu Identitas dan barang

jaminan berupa Emas kemudian disertai membawa biaya administrasi. Kemudian, officer gadai PT. Bank Syariah Mandiri memproses pembiayaan nasabah tersebut.¹¹

Produk gadai emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri perlu kita sambut baik. Karna dengan hadirnya produk gadai emas ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dana.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penulisan bersifat ilmiah yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berbentuk tugas akhir dengan judul : ***“PENERAPAN AKAD RAHN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI”***.

B. Batasan Masalah

Untuk terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasannya pada Respon Nasabah terhadap Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, Respon Nasabah terhadap Tatacara perhitungan Biaya pada Akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dan barang apa saja yang bisa digadaikan dengan menggunakan Akad Rahn Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Penulis tidak akan membahas produk-produk lainnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dalam merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Respon Nasabah terhadap Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

¹¹ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

2. Bagaimana Respon Nasabah terhadap Tatacara perhitungan Biaya pada akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
3. Barang apa saja yang bisa digadaikan dengan menggunakan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Respon Nasabah Tentang Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Respon Nasabah Terhadap Tatacara perhitungan biaya Akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai
3. Untuk mengetahui Barang apa saja yang bisa digadaikan dengan menggunakan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program D3 Perbankan Syari'ah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi penulis sendiri tentang Penerapan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai yang beralamat di Jalan Sudirman Kota Dumai.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah para karyawan dan pimpinan PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan Officer Gadai PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai dalam penerapan Akad Rahn.

c. Populasi dan sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/I bagian Officer Gadai yang berjumlah 2 orang, Pimpinan PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai. Kemudian 5 nasabah dari 919 nasabah pada bulan Agustus 2010 yang menggunakan Akad Rahn dengan teknik Random Sampling di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan ataupun dengan staf karyawan PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai dan data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Observasi, yaitu penulis langsung melakukan pengamatan lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan penelitian.
- b) Interview/Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan pimpinan dan para staf karyawan PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai.
- c) Content Analisis, yaitu dengan menganalisa isi buku..

f. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklasifikasikan data serta menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

g. Teknik Penulisan

- a) Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b) Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dan disusun berdasarkan keperluan penelitian.
- c) Metode Induktif, yaitu dari data-data yang bersifat khusus dianalisa dan diambil kesimpulan bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Systematika pembahasan yang akan dilakukan dalam menyusun laporan akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang tiap-tiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LOKASI

Dalam bab ini terdiri dari sejarah berdirinya PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai, visi dan misi PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai ,

produk-produk yang ditawarkan PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai, dan struktur organisasi PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Dumai.

BAB III TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum Rahn, Rukun dan Syarat Rahn, hak dan kewajiban pihak yang berakad dan Manfaat dan resiko rahn.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Bagaimana Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, Bagaimana Tatacara perhitungan biaya pada Akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dan Barang apa saja yang bisa digadaikan dengan menggunakan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM

PT. BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri

Kerisis moneter sejak tahun 1997, yang disusul dengan krisis politik Nasional telah membawa dampak besar dalam prekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan indonesia yang telah didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang amat parah.kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank indonesia.¹

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Yang pada awalnya berasal dari Bank Susila Bakti yang prinsipnya konvensional kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Itu ditandai dengan lahirnya undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan untuk membuka cabang yang beroperasi sepenuhnya secara syariah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawaai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan Mahkota Prestasi berupaya dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik².

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktek, (Jakarta; PT. Gema Insani, 2001), Cet.Ke-9, h.26

² www.Syariahmandiri.co.id, tgl 6 Juni 2012

Dengan terjadinya merger empat bank yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri.

Perencanaan PT. Bank Mandiri merupakan PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah itu berdasarkan akte Notaris Ny. Machrani, M.S., S.H No. 29, pada tanggal 09 Mei 1999. Kemudian akte Notaris Sutjipto, SH No. 23, pada tanggal 08 September 1999 nama PT. Bank Syariah Sakinah diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Izin perubahan kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999, pada tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999³.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik⁴.

³ *Ibid*

⁴ Dokumentasi, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, 6 Juni 2012

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan suatu bank yang mewujudkan suatu perkembangan ekonomi bersama masyarakat yang berlandaskan syariah dan juga berorientasi mencari laba untuk anggota dan lingkungan dalam perusahaan⁵.

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki cabang di setiap provinsi, baik itu berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu ataupun Kantor Kas yang melayani nasabah Bank Syariah Mandiri. Di Daerah Dumai memiliki 1 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu dan 2 Kantor Kas. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Dumai berdiri 20 Februari 2004, sedangkan KCP terdapat di daerah-daerah seperti Kabupaten Bengkalis, Baganbatu, Bagansiapiapi, Ujung Tanjung dan pada akhir tahun 2011 di resminya KCP Sukajadi di Dumai.

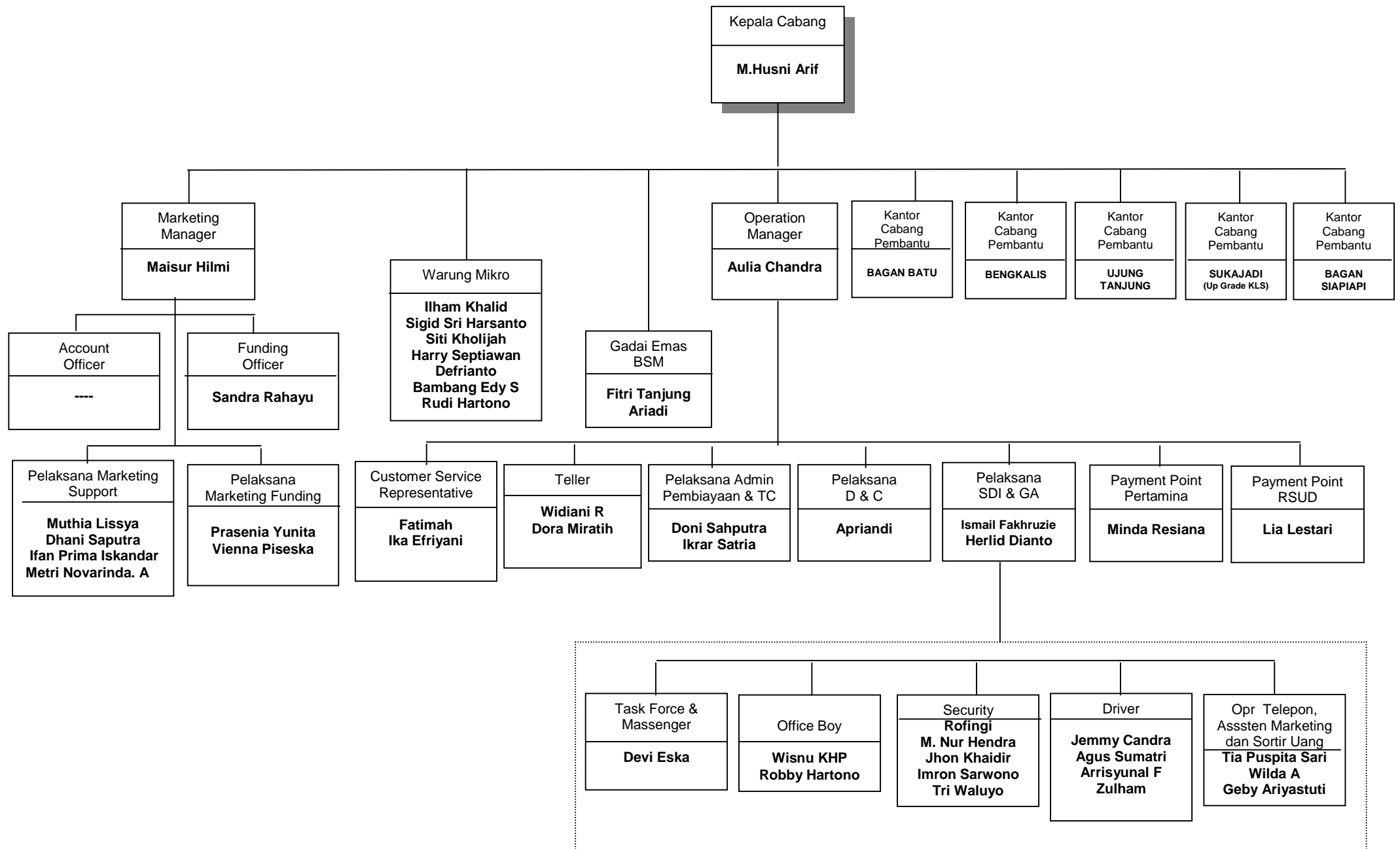
B. Struktur Organisasi

Suatu badan usaha sangat memerlukan struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Struktur organisasi memperlihatkan tingkatan-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberi perintah, menjalankan, melaksanakan, serta siapa yang memutuskan kebijakan sehingga akan tercipta suatu kerjasama yang baik diantara anggota organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan⁶.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*



Keterangan Bagan Struktur Organisasi

KEPALA CABANG	: M. Husni Arif
MARKETING MANEGER	: Maisur Hilmi
ACCOUNT OFFICER	: -
FUNDING OFFICER	: Sandra Rahayu
PELAKSANA MARKETING SUPPORT	: Mithia Lissya, Dhani Saputra, Ifan Prima Iskandar, Metri Novarinda A
PELAKSANA MARKETING FUNDING	: Prasenia Yunita, Vienna Piseska.
OPERATION MANAGER	: Aulia Chandra
KW. MICRO	: Ilham Khalid
OFFICER GADAI	: Fitri Tanjung
PELAKSANA PENAKSIR GADAI	: Ariadi
ANALISIS MIKRO	: Sigid Sri Harsanto
PELAKSANAAN MARKETING MIKRO	: Siti Kholijah, Harry Septiawan, Defrianto, Bambang Edy S, Rudi Hartono.
COSTOMER SERVICE	: Fatimah, Ika Efriyani
TELLER	: Widiani R, Dora Miratih
PELAKSANA ADMIN PEMBIAYAAN & TC	: Doni Sahputra, Ikrar Satria.

PELAKSANA D & C	: Apriadi
PELAKSANA SDI & GA	: Ismail Fakhruzie, Herlid Dianto.
PAYMENT POINT PETAMINA	: Minda Resiana.
PAYMENT POINT RSUD	: Lia Lestari.
TASK FORCE & MASSENGER	: Devi Eska
DRIVER	: Jemmy Candra, Agus Sumatri, Arisyunal F, Zulham.
OPR TELPON, ASSTEN MARKETING DAN SORTIR UANG	:Tia Puspita Sari, Wilda A, Geby Ariyastuti
SECURITY	: Rofigin, M Nur Hendra, Jhon Khaidir, Tri Waluyo, Imron Sarwono, Imron Sarwono.
OFFICE BOY	: Wisnu Kusuma Hadi Pratama dan Robby Hartono.

Uraian Tugas dan Wewenang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Dilihat dari struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatan masing-masing anggota, yaitu :

Kepala Cabang

Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Cabang antara lain :

- Bertanggung jawab atas tercapainya target yang telah ditetapkan direksi yang meliputi pendanaan, jasa-jasa, hasil usaha dan aktiva produktif.
- Terlaksananya pelayanan yang baik bagi seluruh nasabah dengan tetap dilaksanakannya sistem prosedur yang berlaku.
- Terlaksananya pertumbuhan operasional cabang yang wajar dan sehat.
- Menjamin bahwa seluruh transaksi telah diadministrasikan dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menjamin bahwa pelaporan kantor pusat dan Bank Indonesia telah benar dan dikirim tepat waktu.
- Tersedianya sumber daya pendukung operasional cabang yang memadai.
- Tercapainya suasana kerja yang harmonis.
- Pelurusan temuan audit intern/ekstern merupakan hasil evaluasi tim kepatuhan yang menjadi tanggung jawabnya telah ditindak lanjuti.
- Terlaksananya sifat yang tercermin pada pelaksanaan tugas masing-masing pegawai⁷.

Marketing Manajer (MM)

Adapun tugas dan wewenang MM antara lain :

1. Tercapainnya target tahunan yang telah ditetapkan yang meliputi: pendanaan, pembiayaan, jasa-jasa, bagi hasil, dan aktifa produktif.
2. Terlaksananya pemberian pembiayaan yang aman dan efesien.
3. Terlaksananya perlayanan yang baik bagi seluruh nasabah dengan tetap terpenuhinya sistem dan prosedur yang berlaku.
4. Terlaksannanya pertumbuhan operasional cabang wajar dan sehat.

⁷ Bank Syariah Mandiri, "Buku Pedoman Pembagian Kerja".

5. Pelaporan ke kantor pusat dan pihak ekstern yang terkait dengan pembiayaan telah dibuat dengan benar dan dikirimkan tepat waktu.
6. Tersedianya sumber daya dibidang pemasaran yang memadai.
7. Pelurusan temuan audit intern/ekstern maupun hasil evaluasi tim kepatuhan yang menjadi tanggung jawab.
8. Terciptanya suasana kerja yang harmonis.
9. Terlaksananya corporate culture (SIFAT) yang tercemin pada pelaksanaan tugas masing-masing pegawai.

Manajer Operasional (MO)

Adapun tugas dan wewenang MO antara lain :

- Bertanggung jawab atas tercapainya target tahunan yang telah ditetapkan.
- Terselenggaranya pengecekan kelengkapan atau pemenuhan persyaratan pembiayaan yang baik.
- Ketertipan administrasi legal dokumen pembiayaan.
- Terselenggarannya kelancaran dan penanganan kegiantan bidang operasional sesuai ketentuan.
- Kepercayaan pelayanan kas.
- Pelaporan ke kantor pusat dan Bank Indonesia telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

Kepala Warung Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari kepala warung mikro antara lain :

- Mereview analisis pembiayaan.

- Termasuk komite pembiayaan.
- Memantau dan mengawasi kredit macet.
- Menandatangani persetujuan.

Officer Gadai

Adapun tugas dan wewenang dari officer gadai antara lain :

- Memberikan pelayanan pada nasabah secara cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi gadai emas yang dilakukan.
- Menerima dan menghitung secara hati-hati setiap emas dari nasabah.
- Bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan pembiayaan atas jaminan emas.

Pelaksana Marketing Support

Adapun tugas dan wewenang dari pelaksanaan marketing support antara lain :

- Menganalisa berkas masuk.
- Memelihara nasabah.
- Melakukan on the spot (OTS)

Asisten Analisis Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari asisten analisis mikro antara lain :

- Membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
- Checklist NAP
- Wawancara calon nasabah
- Akad pengikatan.

Pelaksanaan Marketing Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari pelaksanaan marketing mikro antara lain:

- Mencari nasabah
- Sosialisasi nasabah
- Menangani pembiayaan < 100 juta

Pelaksana Penaksir

Adapun tugas dan wewenang dari pelaksana penaksir antara lain :

- Menaksir harga emas dari nasabah
- Membuat CSA (Compliance Self Assessment)
- Checklist CSA

Administrasi Pembiayaan

Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah:

- Bertanggung jawab atas pengecekan kelengkapan syarat pembiayaan sebelum fasilitas dikaitkan.
- Berjalannya pemberian informasi tentang kualitas aktiva produktif dan nasabah menunggak kepada manajer operasional.
- Filing dokumen secara aman dan tertib.
- Terlaksananya pelaporan pembiayaan yang benar dan tepat waktu.

Pelaksanaan SDI & GA

Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah:

- Kelengkapan serta keutuhan kelengkapan kantor dan harta tetap kantor baik sewa maupun milik sendiri.
- Monitor absensi pegawai.
- Memastikan bahwa hak pegawai telah dipenuhi / dibayar sesuai ketentuan.
- Memastikan pengelolaan arsip cabang telah berjalan sesuai ketentuan.
- Kebenaran pencatatan transaksi harian, bulanan, pembukuan, dan administrasi bagian logistik.
- Kelengkapan sarana administrasi peralatan atau perlengkapan kantor.
- Ketersediaan barang cetakan dan alat tulis kantor serta berbagai kebutuhan kantor lainnya.
- Menyimpan, membuat daftar file, bertanggung jawab atas bukti/file pembukuan yang telah dilakukan pemeriksaan.

Teller

Tugas pokok dan tanggung jawab teller :

- Memberikan pelayanan pada nasabah secara tepat, cermat, cepat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
- Merencanakan dan mengajukan kebutuhan uang tunai untuk transaksi harian.
- Memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan maupun penyetoran (simpanan atau angsuran)
- Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari dan membuat rekapitulasi transaksi harian.
- Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada box teller diakhir hari

- Kekurangan dana atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian merupakan tanggung jawab teller.
- Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Operasional Officer⁸.

Custumer Service

Custumer Service yang bertugas melayani nasabah dan calon nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta melayani keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.

C. VISI dan MISI PT. Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Bank syariah Mandiri mempunyai strategi dalam kegiatan operasionalnya. Adapun visi bank tersebut yaitu :

“Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”

2. Misi

Selain itu Misi Bank Syariah Mandiri yaitu :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

⁸ *Ibid*

ETHIC

a. *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

b. *Team Work*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

c. *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama.

d. *Integrity*

Mentaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.

e. *Customer Focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

Prinsip – Prinsip Bank Syariah Mandiri

1. Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil dan transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam.

2. Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Bank Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai intermediary institution lewat skema pembiayaan yang dimilikinya.

3. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4. Univesalitas

Bank Syariah Mandiri mendukung operasionalnya dengan tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

D. Produk dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

BSM dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik tabungan giro dan deposito kemudian disalurkan kembali melalui pembiayaan.

1. Pendanaan IB BSM

Adalah simpanan yang berasal dari masyarakat.

- a. Tabungan BSM : Simpanan dari masyarakat atau badan hukum lainnya secara umum termasuk juga mahasiswa, tabungan ini mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,-⁹
- b. Tabungan Simpatik BSM : Tabungan ini dikhususkan untuk anak SD sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan setoran awal Rp. 20.000,-.
- c. Tabungan Mambrur BSM : Tabungan ini penarikannya pada saat menunaikan haji, dalam hal ini bank bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- d. Tabunganku (Wadiah) adalah tabungan atau titipan murni yang berasal dari individu atau kelompok badan hukum.
- e. Tabungan BSM Dollar

⁹ *Ibid*

- f. Tabungan Berencana BSM
- g. Tabungan Kurban BSM
- h. Tabungan BSM Investa Cendikia
- i. Deposito BSM
- j. Giro BSM

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan) IB BSM

- a. BSM Pembiayaan Konsumer
- b. BSM Pembiayaan Komersial
- c. BSM Pembiayaan Korporat
- d. BSM Edukasi
- e. BSM Griya
- f. BSM Impian
- g. BSM Implan
- h. Pembiayaan Resi Gudang BSM
- i. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PK3PA)
- j. Gadai Emas
- k. Talangan Haji BSM
- l. Pembiayaan Kepada Pensiunan
- m. Pembiayaan Peralatan Kedokteran
- n. Pembiayaan Umroh
- o. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat
- p. BSM Warung Mikro¹⁰.

3. Jasa – Jasa lain IB BSM

- a. BSM Call

¹⁰ *Ibid*

- b. BSM Card (ATM & Debit Card)
- c. Sentra Bayar BSM
- d. BSM Mobile Banking
- e. BSM Net Banking
- f. Pajak On Line BSM
- g. BSM L/C
- h. Transfer Valas BSM
- i. Bank Garansi BSM
- j. Kliring BSM
- k. BSM Transfer Uang Tunai

Pada BSM Transfer Uang Tunai ini, nasabah dapat mengirimkan uangnya kepada nasabah lain baik melalui di dalam bank maupun di luar bank (dengan menggunakan mesin ATM).

BAB III

AKAD RAHN

A. PENGERTIAN GADAI

Gadai dalam fikih islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹

Ar-rahn menurut bank Indonesia (1999) adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.²

Namun, pengertian Gadai di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama yang mempunyai utang.³

Tetapi objek gadai di pasal 1150 KUH hanya meliputi benda-benda bergerak. Namun demikian pengertian benda bergerak ini masih dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- a. Benda bergerak yang berwujud misalnya sepeda motor, lemari, perabotan rumah tangga dan lain-lain.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet. 1 hal, 1-2.

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praksi Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) Cet. 1.

³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h, 2

⁶ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989)

teransaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang bepiutang (rahn).⁷

2. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Dasar hukum yang kedua yang dijadikan rujukan dalam Gadai Syariah adalah Hadis Nabi Muhammad Saw.

a. Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Iman Muslim, Yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya menggambarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah

⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*

SAW. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan mengadaikan baju besinya.
(HR. Muslim)

- b. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'I dan Ad-Daruquthni).

- c. Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi di madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah).

- d. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari)

3. Ijma' Ulama

Ulama menyepakati kebolehan status Hukum Gadai. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang mengadaikan bayu besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi.⁸

4. Dalam Perundangan-Undangan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.⁹

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁸ *Ibid*, h. 8

⁹ Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009), hal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.¹⁰

C. RUKUN DAN SYARAT AKAD RAHN

1. Rukun Gadai

Dalam fiqih rukun gadai sebagai berikut:

a. Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu:

- Rahin (orang yang menggadaikan barangnya),
- Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau penerimaan gadai.

Hal yang dimaksud, didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai.

b. Ma'qud 'alaih (barang yang diakadkan)

Barang yang diakadkan meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- Marhun (barang yang digadaikan)
- Marhun bihi (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad *Rahn*.

2. Syarat-Syarat Gadai

Syarat-syarat gadai terdiri atas:

- a. Shighat. syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.¹¹
- b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* Hal, 8.

¹¹ *Ibid*, h. 21

Maksud dari Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum adalah pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (Marhun bih).

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian sebagai berikut:

- Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang.
- Merupakan barang yang bisa dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun

Marhun adalah harta yang di pegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang.¹²

Secara umum barang gadai harus memiliki beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus diperjualbelikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, bila tidak maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh rahin (peminjam/pegadai) apabila bukan pemilik rahin harus seizing pemilik yang sebenarnya.

D. KEWAJIBAN PIHAK YANG BERAKAD

1. Hak Penerima Gadai

¹² *Ibid*, h. 22

- a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin)¹³

2. Kewajiban Penerima Gadai

- a. Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap marhun akibat dari kelalaian, maka murtahin harus bertanggung jawab.
- b. Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi.
- c. Sebelum diadakan pelelangan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin.¹⁴

Kemudian hak dan kewajiban pemberi gadai adalah:

1. Hak Pemberi Gadai

- a. Setelah melunasi pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang iya serahkan kepada murtahin.
- b. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun.

¹³ *Ibid*, h. 40

¹⁴ *Ibid*, h. 41

- c. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun.
- d. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin maka rahin berhak meminta marhunnya kembali.

2. Kewajiban Pemberian Gadai

- a. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- b. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus melakukan penjualan atas marhun miliknya.¹⁵

E. MANFAAT DAN RESIKO AKAD RAHN

1. Manfaat gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya Jumhur Fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadainya tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Iman Ahmad, Ishak, dan al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai

¹⁵ M. Nadrattuzaman Hosen, Dkk, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2006), h. 19

tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.¹⁶

Adapun perbedaan pendapat tentang pemanfaatan barang gadai adalah antara Ulama Syafi'iyah, Ulama Malikiyah, Ulama Hanabilah dan Ulama Hanafiyah.¹⁷

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) adalah pemberi gadai (rahin) walupun marhun itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai(murtahin).

Menurut pendapat Ulama Malikiyah bahwa penerima harta benda gadai (murtahin) hanya dapat menfaatka harta benda barang gadainya atas izin dari pemberi gadai.

Menurut Ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah:

- a. Ada izin dari pemilik barang.
- b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Menurut Ulama Hanafiyah sesuai dengan fungsi dari barang gadai (marhun sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.¹⁸

2. Resiko gadai

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Raja, 2007), h.109

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h, 41-43

¹⁸ *Ibid*, h. 44

Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib mengantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karna kelalaian murtahin atau karna disia-siakan.

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau hilangnya marhun, bila marhun itu rusak atau hilang, baik karna kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.¹⁹

¹⁹ H. Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 110

BAB IV

PENERAPAN AKAD RAHN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI

A. Respon Nasabah Terhadap Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

1. Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) telah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas kerja utama sebagai pedoman kerja tahun 2009 yang tercantum di dalam Rancana Bisnis Bank (RBB) tahun 2009.

Salah satu dari 10 prioritas kerja utama dimaksud adalah:

“mengembangkan pembiayaan dengan hati-hati sekurang-kurangnya Rp 3,43 triliun dengan focus pada UMKM, sehingga porsi pembiayaan UMKM menjadi 58%, pembiayaan korporasi maksimal 42% dengan rasio FDR < 91,93% dan membangun bisnis Rahn dengan sebaik-baiknya untuk mencapai portofolio minimal Rp 60 milyar.

Bank Syariah dapat melaksanakan bisnis gadai karna memiliki dasar hukum yang memadai. Potensi pasar gadai cukup besar untuk menjadi produk pembiayaan BSM.¹

Definisi Gadai yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

Gadai menurut Hukum Positif Indonesia adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan oleh seorang berutang kepada si berpiutang, atau orang lain atas namanya dan mengambil pelunasan secara didahulukan dari orang-orang

¹ Dokumentasi, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Dumai, 6 Juni 2012.

berpiutang lainnya, kecuali atas biaya untuk menjual dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

Gadai dalam bahasa arab adalah Ar Rahn, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Mazhab Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan gadai dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang tidak dapat membayar hutangnya.²

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri iB adalah produk Bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip Qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/haarta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip Ijarah.³

Tujuan Gadai di Bank Syariah Mandiri adalah membantu nasabah untuk keperluan sosial (seperti pendidikan dan kesehatan) atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak.⁴

Gadai Emas BSM, jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh Perusahaan Minimum 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang 3 kali, Maksimum Pembiayaan adalah 1 Tahun.

Gadai ulang Emas dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- Penaksir telah melakukan penaksiran ulang atas barang jaminan.
- Nasabah telah melunasi biaya pemeliharaan untuk gadai ulang.⁵

Nilai pembiayaannya adalah Mulai dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 100.00.00.000,00 (seratus juta rupiah). Pembiayaan tersebut dapat disetujui oleh cabang langsung. Tetapi pembiayaan Rp 250.000.000,00 harus dikirim kepusat terlebih dahulu untuk

² *Ibid.*

³ Azhar, kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 12 maret 2012

⁴ Fitri Tanjung, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 22 Mei 2012

⁵ *Ibid.*

mengetahui terima atau tidaknya pembiayaan tersebut. Maksimum Gadai sebesar 75% dari nilai taksiran Bank atas barang (Emas).⁶

Aspek Teknis dalam Prosedur Pembiayaan Gadai yang Diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai sebagai berikut:

1. Syarat

Persyaratan bagi rahin yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Gadai antara lain:

- a. Perorangan (WNI).
- b. Cakap hukum.
- c. Mengisi formulir permohonan beserta salinan identitas diri (KTP atau Paspor) yang masih berlaku dan menyerahkan barang jaminan.
- d. Pembiayaan di atas Rp 50.000.000 wajib memiliki MPWP.⁷

2. Tahap Analisa/Penaksiran Permohonan Gadai

- a. Nasabah melengkapi Formulir Permohonan Gadai Emas sebagai dasar proses analisa pembiayaan. Berdasarkan informasi nasabah dan hasil taksiran dari penaksir, komite pembiayaan Gadai memberikan keputusan pemberian/penolakan pembiayaan dengan mencantumkannya dalam formulir permohonan pada kolom/table yang telah disediakan untuk masing-masing level Komite Pembiayaan Gadai dan Penaksir.
- b. Sebelum pembiayaan diberikan, penaksir sesuai dengan level yang telah ditetapkan akan melakukan penaksiran terhadap obyek jaminan dengan mekanisme/prosedur penaksiran barang/objek gadai mengacu pada pedoman

⁶ *Ibid.*

⁷ Ariadi, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 6 Juli 2012.

penaksiran emas (PPE). Pemutusan pemberian pembiayaan sesuai dengan limit kewenangan *Officer Gadai* memverifikasi taksiran dan memutuskan pembiayaan.

c. Penaksir menganalisa penemuan ketentuan prinsip one obliger .

3. Limit Pembiayaan

- Sesuai dengan maksimum nilai taksiran maksudnya Besarnya limit pembiayaan sesuai dengan maksimum gadai.
 - Kurang dari maksimum nilai taksiran
- Nasabah diperkenankan mengambil pembiayaan kurang dari besarnya limit pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi besarnya biaya yang dibayarkan, karena pada dasarnya biaya yang dibayarkan mengikuti kuantitas dan kualitas barang jaminan.⁸

4. Pencairan

- Penaksir mewajibkan nasabah untuk membuka rekening tabungan di bank.
- Nasabah telah menandatangani Akad qardh dalam rangka rahn, Akad Ijarah dan Surat Bukti Gadai Emas.
- Nasabah telah membayar biaya gadai dan biaya-biaya lain yang timbul berkaitan dengan akad-akad tersebut, biaya-biaya tersebut dapat dibayar melalui pembiayaan yang di cairkan oleh bank dengan cara potongan pembiayaan.

5. Dokumentasi

- Cabang/unit kerja wajib melengkapi secara tertib dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian gadai yang meliputi:
 - a. Formulir permohonan dan lampirannya.
 - b. Surat Bukti Gadai Emas.
 - c. Penyimpanan barang jaminan.

⁸ Dokumentasi, *loc. Cit.*

6. Pelunasan

- Pelunasan gadai dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara:
 - a. Mendebitkan rekening nasabah sesuai kuasa pendebitan yang tertera di dalam Surat Bukti Gadai Emas.
 - b. Meminta nasabah untuk menyetor tunai sebesar kewajibannya.
 - c. Menggunakan hasil penjualan barang jaminan.
- Jenis pelunasan pembiayaan.⁹
 - a. Pelunasan dipercepat.
 - b. Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo.
 - c. Pelunasan sebagian.

7. Taksiran utama produk gadai adalah barang yang digadaikan berupa emas. Oleh karna itu, dalam melakukan taksiran, pihak terkait perlu memperhatikan:

- Penaksir melakukan penaksiran.
- Officer gadai memverifikasi taksiran dan memutuskan pembiayaan.
- Pegadaian kantor pusat menetapkan Harga Pasar Emas (HPE) berdasarkan informasi dari cabang atau informasi eksternal lainnya.
- Tata cara penaksiran objek gadai harus mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan.

8. Wewenang Persetujuan

- a. Proses/Wewenang Pemutusan Pembiayaan Gadai:

1. Penaksir

⁹ *Ibid.*

- Penaksir bertanggung jawab terhadap akurasi nilai taksiran, kualitas/keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan.
- Penaksir menginformasikan kepada *Officer Gadai* tentang nilai dan keaslian barang jaminan serta memberikan rekomendasi limit pembiayaan dengan berpegang teguh pada kejujuran, obyektivitas, kecermatan dan ketelitian.
- Syarat sebagai penaksir telah mengikuti pendidikan penaksir yang diselenggarakan oleh Bank dan memiliki bukti telah lulus dalam pendidikan penaksir.¹⁰

2. Officer Gadai

- *Officer Gadai* bertanggung jawab memverifikasi akurasi nilai taksiran, kualitas/keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan yang dilakukan Penaksir.
- *Officer Gadai* memutuskan pembiayaan s.d. kewenangan *Officer Gadai* (yang diatur dalam surat/ketentuan tersendiri) yang dapat ditinjau secara berkala. Apabila pembiayaan melebihi limit *Officer Gadai*, maka *Officer Gadai* akan memberikan rekomendasi kepada Komite Pemutus di atasnya dengan berpegang teguh pada kejujuran, obyektivitas, kecermatan dan ketelitian.¹¹
- Syarat sebagai *Officer Gadai* adalah telah memiliki pengalaman menaksir emas dan perhiasan minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat menaksir atau *Officer Bank* yang telah lulus dari pendidikan *Officer Gadai* yang diselenggarakan oleh Bank.

3. Tingkat kewenangan memutus pembiayaan gadai di atur sebagai berikut:

¹⁰ Ariadi, *loc. Cit.*

¹¹ Fitri Tanjung, *loc. Cit.*

Tabel. IV. I
Kewenangan Memutus Pembiayaan Gadai

level	Anggota Komite Pembiayaan Gadai
Officer Gadai	Penaksir
Kepada Cabang Pembantu	Penaksir Officer Gadai
Kepala Cabang	Penaksir Officer Gadai

4. Komite Pembiayaan Gadai

- bertugas untuk memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan gadai sesuai dengan limit kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi.
- Bertanggung jawab terhadap kebenaran/keakurasian nilai penaksiran, keaslian barang, baik yang dilakukan oleh penaksiran Cabang maupun Penaksiran Kantor Pusat digunakan sebagai dasar keputusan pembiayaan.
- Besarnya limit wewenang memutus pembiayaan gadai ditetapkan Direksi melalui SK Limit Memutus Pembiayaan Gadai.¹²

9. Penyimpanan Barang Gadai

a. Tempat Penyimpanan Barang Jaminan (*main vault*)

Tempat penyimpanan barang jaminan berupa lemari besi dengan kunci dan nomor kombinasi sebagai pengaman. Di dalamnya memiliki sekat/jalur untuk meletakkan barang jaminan yang telah terbungkus dalam kantung jaminan.

b. Kemasan

- Barang jaminan harus dikemas dalam kantung plastik jaminan yang telah disediakan, yang salah satu sisinya dapat digunakan untuk menandai.
- Pengaman jaminan menggunakan segel khusus pada kantung jaminan.

¹² Dokumentasi, *Loc. Cit.*

- *Officer Gadai* melakukan penyegelan.
- Pejabat yang terlibat dalam proses Uji Acak maupun Uji Opname harus melakukan penyegelan dengan membubuhkan matris masingmasing pada kemasan jaminan.¹³

c. Segel

Segel kantung jaminan menggunakan alat pemanasan plastic.

d. Penyimpanan Sementara

- Penaksir harus menyimpan barang jaminan dalam kotak khusus Penaksir (kotak penyimpanan sementara) setiap kali selesai melakukan penaksiran.
- *Officer Gadai* mengunci kotak penyimpanan sementara dan menyimpan kunci kotak tersebut.
- Pada akhir hari, *Officer Gadai* dan Penaksir beserta Petugas *Loan Administration and Trade Service (Loan Admin)* mengosongkan kotak penyimpanan sementara dan barang jaminan disimpan ke dalam khasanah.

e. Penyimpanan

- Penyimpanan dalam *main vault* dilakukan dengan pola penggabungan barang jaminan per bulan transaksi berjalan dan dimasukkan dalam kelompok brankas sesuai dengan bulan transaksi.
- Jika barang jaminan gadai diperpanjang, maka barang jaminan dimaksud harus disimpan pada kelompok bulan saat *gadai ulang*.
- Petugas *Loan Admin* harus mencatat dalam Buku Gudang mengenai jumlah barang jaminan di dalam *main vault*.

f. Pengeluaran Barang Jaminan.

¹³ Ibid.

- Pelunasan pembiayaan, penjualan barang jaminan atau sebab lain yang dapat diterima dan disetujui Bank dapat menyebabkan pengeluaran barang jaminan.
- Komite pemutus yang sesuai levelnya harus memberikan persetujuan untuk setiap pengeluaran barang jaminan.
- Proses pengeluaran barang jaminan merujuk kepada kebijakan Bank yang berlaku.¹⁴

10. Asuransi

- a. Asuransi barang jaminan dalam penyimpanan khasanah (goods in save).
 - Bank menutup/mempertanggungkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi untuk melindungi barang jaminan yang disimpan.
 - Nasabah menanggung biaya asuransi barang jaminan.
 - Pertanggungan dilakukan terhadap lemari penyimpan (dan isinya) dengan nilai pertanggungan sebesar 100% dari nilai taksiran.
 - Kerugian yang dapat diganti dalam pertanggungan asuransi tersebut meliputi kebongkaran atau barang jaminan hilang, sedangkan yang tidak dapat diganti adalah kerugian akibat *force majeure*.
 - Perlindungan terhadap asuransi berlaku selama barang jaminan berada dalam kekuasaan bank.
- b. Asuransi Barang Jaminan Dalam Pengiriman (good in transit)
 - Guna melindungi barang jaminan dalam perjalanan ke kantor pusat, Bank mempertanggungkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi.
 - Nasabah menanggung biaya asuransi jaminan dalam pengiriman (good in transit).
- c. Mekanisme Penutupan Asuransi

¹⁴ Fitri Tanjung, *loc. Cit.*

- Bank mengasuransikan setiap barang jaminan yang disimpan melalui asuransi rekanan yang ditetapkan.
- Jaminan asuransi untuk seluruh barang jaminan yang disimpan
- ditetapkan melalui limitasi yang besarnya ditentukan dan dapat ditinjau ulang secara berkala.
- Apabila nilai barang jaminan melebihi limit yang ditetapkan, maka *Loan Admin* membuat catatan (deklarasi harian) dan Cabang wajib menyampaikan kepada pihak asuransi setiap bulan sesuai tanggal yang ditetapkan.
- Cover asuransi 100% terhadap nilai taksiran barang jaminan.

d. Jangka Waktu Asuransi

Asuransi berlaku sejak nasabah menandatangani surat permohonan dan berakhir sebagai dengan tanggal jatuh tempo, sesuai yang tertera pada surat permohonan gadai emas.

11. Prinsip One obliger

Nasabah dapat menikmati/memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas/rekening pembiayaan atau menggadaikan sejumlah obyek gadai baik dalam 1 (satu) atau lebih transaksi. Oleh karena itu, keputusan pemberian pembiayaan harus berdasarkan pada penilaian seluruh pembiayaan yang telah diberikan kepada pemohon dan tidak diperkenankan berdasarkan pada permohonan satu transaksi saja. Hal ini juga harus tercermin dalam Formulir Permohonan.

12. Surat Peringatan Jatuh Tempo

Kepada nasabah yang telah jatuh tempo, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penaksir sebagai berikut:

Tabel. IV. II

Surat Peringatan Jatuh Tempo¹⁵

No	Keterlambataan	Bentuk peringatan
1	H	Pemberitahuan via telpon kepada nasabah.
2	H + 2	Pengiriman Surat Peringatan I
3	H + 7	Pengiriman Surat Peringatan II
4	H + 12	Pengiriman Surat Peringatan III

13. Penjualan Barang Jaminan

- a. Penjualan Barang Jaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan nasabah bila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut.
- b. Sistem Penjualan Dilakukan dengan cara:
 - Bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk merekomendasi pembeli barang.
 - Bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.
- c. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan:
 - dilakukan terbuka untuk umum (termasuk karyawan).
 - Tanggal jual barang jaminan ditetapkan pada tanggal **10** dan **26** setiap bulannya dengan waktu (jam pelaksanaan) menyesuaikan dengan kondisi Cabang. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaannya mundur ke tanggal berikutnya.
 - hari penjualan dilaksanakan selama-lamanya 2 (dua) hari kerja.
- d. Beberapa Hal Berkaitan dengan Penjualan yang perlu menjadi perhatian adalah:

¹⁵ *Ibid.*

Harga Dasar Penjualan adalah harga yang ditetapkan oleh Bank terhadap barang-barang jaminan yang akan dijual yang merupakan harga pasar.

e. Apabila dalam Penjualan diatas barang tidak terjual/tidak laku, untuk penyelesaiannya diatur sebagai berikut:

1. Harga dasar penjualan < Pembiayaan nasabah.
 - Barang jaminan tidak boleh dijual pada kesempatan tersebut dan dicatat sebagai barang sisapenjualan (formulir barang sisa).
 - Barang Sisa Penjualan ini harus segera dijual selambatnya pada periode penjualan berikutnya.
 - Kerugian yang timbul akibat hal tersebut akan dialokasikan sebagai kerugian perusahaan pada Cabang yang bersangkutan. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh turunnya (*fluktuasi*) harga pasar barang jaminan dimaksud.
2. Harga Dasar Penjualan > Pembiayaan Nasabah, tetapi belum dapat menutupi biaya bank yang timbul karna proses penjualan.
3. Harga Dasar Penjualan jauh lebih rendah daripada pembiayaan nasabah yang terjadi akibat kesalahan menaksir dan sebagainya sehingga dapat dikategorikan sebagai barang bermasalah.

f. Kelebihan/Kekurangan Hasil Penjualan

1. Hasil Penjualan > Harga Dasar Penjualan, maka sisa kelebihannya:
 - setelah dikurangi dengan biaya bank akan dikredit sebagai uang kelebihan penjualan ke rekening nasabah atau dikembalikan ke nasabah.
2. Hasil Penjualan < Harga Dasar Penjualan, maka sisa kekurangannya:
 - akan menjadi beban Cabang sebagai kerugian perusahaan. Namun demikian, bank tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan.

- g. Khusus untuk penemuan kasus barang palsu, maka barang jaminan dimaksud tidak boleh dijual dan harus dilaporkan ke Kantor Pusat untuk proses investigasi lebih lanjut.

b. Respon nasabah terhadap Prosedur Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Dari Aspek Teknis dalam Prosedur akad rahn yang Diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, masih kurang transparan dalam menjalankan prosedur akad rahn. Ini terlihat terhadap 4 nasabah dari 5 nasabah yang tidak tahu banyak tentang prosedur tersebut. Masing-masing pendapat nasabah antarlain adalah sebagai berikut:

1. Menurut nasabah Ibu Rosidah menyatakan bahwa saya hanya mengetahui prosedur yang ada di BSM ini hanya syarat-syaratnya saja. Seperti surat identitas dan mengisi formulir.¹⁶
2. Menurut nasabah Ibu Aning menyatakan sudah maksimal sosialisasi yang dilakukan bank. Nasabah ini mengetahui sebagian prosedur akad rahn (gadai) di BSM antara lain seperti syarat, adanya penaksiran barang terlebih dahulu, pelunasan biaya, pencairan dan pelunasan pembiayaan. Selebihnya saya tidak mengetahui pasti.¹⁷
3. Menurut Bapak Zulkifli menyakatan bahwa prosedur yang ada di BSM masih kurangnya sosialisasi karena yang saya tahu adalah persyaratannya saja.¹⁸
4. Menurut Ibu Ati menyatakan bahwa persedurnya akad rahn sudah cukup baik karna adanya penjelasan saat menjalankan gadai, tetapi pihak bank hanya

¹⁶ Rosidah, nasabah Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 12 maret 2012

¹⁷ Aning, nasabah Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 12 maret 2012

¹⁸ Zulkifli, nasabah Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 12 maret 2012

menjelaskan yang umum saja. Seperti syarat, biaya-biaya pencairan, dan pelunasan.¹⁹

5. Kemudian menurut Ibu Lala menyatakan bahwa masih kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan terhadap bank karena saya sendiri saja hanya mengetahui prasyarat, biaya-biaya, pencairan dan pelunasan atau menurut nasabah ini angsuran jangan sampai telat.²⁰

Dari prosedur Gadai yang ditetapkan oleh kantor pusat dalam Penerapannya di kantor Cabang Dumai masih belum sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Ini terlihat dari nasabah yang melakukan akad gadai emas. Masih banyaknya nasabah yang tidak mengetahui secara penuh tentang Prosedur yang diterapkan. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank.

B. Respon Nasabah Terhadap Tatacara Perhitungan Biaya pada Akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

a. tatacara perhitungan biaya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Akad yang dipakai oleh PT. Bank Syariah Mandiri Khususnya dibagian Gadai untuk Biaya-Biaya adalah Qardh dan Ijarah.

Qardh adalah Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²¹

Ijarah adalah Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

¹⁹ Ati, nasabah Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 13 maret 2012

²⁰ Lala, nasabah Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, *Wawancara*, Dumai, 13 maret 2012

²¹ Ibid.

Sehubungan dengan kesahan suatu akad pembiayaan, perlu juga diperhatikan ketentuan aturan biaya materai, berguna agar surat perjanjian pembiayaan dapat dijadikan suatu bukti tulis yang Sah. Sedangkan lampiran pada akad pembiayaan harus ditanda tangani.

Di Bank Syariah Mandiri Biaya-Biaya gadai terdiri Atas Biaya administrasi, Biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain.

- b. Biaya Administrasi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh nasabah untuk keperluan administrasi gadai yang meliputi biaya materai dan asuransi yang dibayai di awal periode.

Biaya administrasi diambil di awal periode gadai. Biaya yang diambil dimuka meliputi biaya matrai Rp 12.000, dan biaya barang asuransi.

- c. Biaya Pemeliharaan adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank untuk jasa pemeliharaan barang jaminan selama jangka waktu pembiayaan qardh dan dibayarkan di akhir periode pembiayaan atau pada saat pelunasan.

Cara perhitungan biaya

Direktur Pembiayaan Gadai (DPG) akan menginformasikan kepada Cabang biaya gadai per gram untuk emas 24 karat. Apabila nasabah menggadaikan emas di bawah 24 karat, maka biayanya dihitung secara proporsional.²²

Contoh:

Pada tanggal 10 Maret 2009 ditetapkan biaya gadai emas per gram 24 karat sebesar Rp5.500,00. Nasabah datang menggadaikan emas 18 karat dengan berat 5 gram untuk jangka waktu 4 bulan. Berapa biaya yang harus dibayarkan?

²² *Ibid.*

Jika ditetapkan harga dasar emas (HDE) per gram untuk emas 24 karat sebesar Rp312.000,00. Jumlah pembiayaan terhadap taksiran barang jaminan (LTV) sebesar 85%.

1. Menetapkan nilai taksiran dan pembiayaan:

- Nilai taksiran oleh Bank (*market value*):

$$\underline{18} \text{ karat} * \text{Rp}312.000,00 * 5 \text{ gram} = \text{Rp}1.170.000,00$$

24 karat

- Pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah (*assessment value*):

$$85\% * \text{Rp}1.170.000,00 = \text{Rp}994.500,00$$

2. Menetapkan biaya yang harus dibayar nasabah pada saat penandatanganan akad:

- Biaya administrasi Rp20.000,00 (termasuk materai Rp12.000,00 dan administrasi gadai Rp8.000,00)
- Biaya asuransi, yang dihitung sbb:

$$(\% \text{ Asuransi} / 12) * \text{Jangka Waktu (bulan)} * \text{Market Value}$$

$$\underline{1,2\%} * 4 \text{ bulan} * \text{Rp}1.170.000,00 = \text{Rp}46.800,00$$

12

Total biaya yang dibayarkan oleh nasabah atau didebet dari pencairan sejumlah Rp 24.680,00.

3. Menghitung biaya pemeliharaan:

Biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo, sebagai berikut:

- Biaya pemeliharaan per bulan:

$$\underline{18} \text{ karat} * \text{Rp}5.500,00 = \text{Rp}4.125,00 \text{ per gram per bulan}$$

24 karat

- Total Biaya pemeliharaan:

$$\text{Rp}4.125,00 * 5 \text{ gram} * 4 \text{ bulan} = \text{Rp}82.500,00$$

4. Menghitung biaya pemeliharaan, apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo:

Pendekatan yang digunakan sbb:

- a. Perhitungan bulanan, apabila tanggal pelunasan sama dengan tanggal pembiayaan, atau mendekati (kurang dari tanggal pembiayaan).
- b. Perhitungan harian (dihitung per 15 hari) apabila di luar ketentuan perhitungan bulanan.

Pembulatan nilai taksiran dan biaya

Pembulatan diatur sebagai berikut:

1. Nilai taksiran tidak dibulatkan.
2. Nilai pembiayaan dibulatkan kebawah mendekati ribuan terdekat.
3. Biaya pemeliharaan dibulatkan ke bawah pada kelipatan lima ratus terdekat.²³

b. Respon nasabah terhadap tatacara perhitungan biaya

Dari Tatacara perhitungan Biaya di atas menurut pendapat penulis udah terpar di Brosur yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dan sangat jelas. Tetapi dari pertanyaan yang di berikan Penulis terhadap Nasabah Gadai masih belum mengetahui sistrem perhitungan biaya yang dikenakan oleh bank. Baik biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Adapun jawaban nasabah sebagai berikut:

1. Menurut Ibu Rosidah menyatakan tatacara perhitungan memang sudah ada di brosur akad rahn. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara perhitunganya. Biaya-biaya tidak

²³ Dokumentasi, *loc.Cit.*

terlalu memberatkan tetapi keinginan saya setidaknya biaya di potong pada saat pencairan dana buka pada saat akad.²⁴

2. Menurut Ibu Aning menyatakan saya tidak tahu bahwa ada tatacara perhitungan biaya di brosur. Tetapi saya tidak keberatan biaya-biaya yang di kenakan nanti pada saat akad.²⁵
3. Menurut Bapak zulkifli bahwa biaya-biaya yang di kenakan ke nasabah memberatkan, karna saya membutuhkan dana kenapa saya di bebaskan biaya-biaya lagi.²⁶
4. Menurut Ibu Ati menyatakan bahwa perhitungannya sudah jelas dan sudah sesuai dan biaya-biayanya memang sudah tanggung jawab kita sebagai nasabah. Tetapi masukan saya sebaikan biaya-biaya yang di kenakan di potong pada saat pencairan dana.²⁷
5. Menurut Ibu Lala bahwa tatacara perhitungan biaya saya belum megerti dan biaya-biayanya kenapa masih dibebankan ke nasabah kususny biaya matrai.²⁸

Di tatacara perhitungan biaya pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai harus lebih menjelaskan kepada nasabah tentang akad-akad apa saja yang di pakai pada saat perhitungan biaya-biaya tersebut. Kemudian biaya-biaya apa saja yang menjadi kewajiban atau yang wajib oleh bank untuk melancarkan pembiayaan yang di lakukan oleh nasabah. Agar tidak adanya keraguan nasabah terhadap perhitungan tersebut. Pihak bank juga tidak boleh terpaku terhadap brosur yang diberikan ke nasabah dan tidak berangapan nasabah langsung mengerti. Sebaikan pihak bank harus mensosialisasikan kembali ke pada nasabah tetang tatacara perhitungan tersebut.

2. **Barang yang Bisa Digadaikan dengan Menggunakan Akad Rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai**

²⁴ Rosidah, *Loc. Cit.*

²⁵ Aning, *Loc. Cit.*

²⁶ Zulkifli, *Loc. Cit.*

²⁷ Ati, *Loc. Cit.*

²⁸ Lala, *Loc. Cit.*

Jenis produk/gadai yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai adalah Emas. Objek gadai Emas berupa Perhiasan maupun Batangan.

Warna emas perhiasan setelah dipadukan dengan logam lain yang diterima oleh Bank yaitu:

- Emas Merah: Emas Murni + Tembaga
- Emas Kuning: Emas Murni + Perak

Emas batang yang diterima oleh Bank adalah:

- Emas Batang Toko adalah emas yang berasal dari toko yang bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan emas batang antam.
- Emas batang Antam adalah emas yang berasal dari perusahaan yang membuat emas yang emasnya ada sertifikatnya.²⁹

Kekuatan kadar emas

Logam emas dalam keadaan murni mempunyai sifat fisik yang lunak karena itu apabila dibentuk menjadi perhiasan harus dicampur dengan logam lain. Akibat campuran dengan logam lain sehingga kekuatan kadarnya dinyatakan dengan karat.

Istilah karat merupakan satuan angka yang menunjukkan banyaknya satuan emas yang terkandung dalam satu kondisi campuran, dengan parameter angka perbandingan tertinggi adalah 24. Emas dengan peringkat 24 karat berarti merupakan emas murni tanpa campuran dengan logam lainnya, emas 20 karat mempunyai kandungan emas murni sebanyak 20 bagian dan 4 bagian merupakan logam campuran.

Pada umumnya pengelompokan kekuatan emas dibagi menjadi 2 (dua) macam:

- Standar Amerika Dengan symbol Karat.

²⁹ Fitri Tanjung, *loc. Cit.*

- Standar Eropa dengan symbol peribuan.

Kadar emas/karatase yang berlaku di Bank Syariah Mandiri antara 16 s.d. 24. Terlihat di table sebagai berikut:

Table. IV. III

Tabel Kadar/Kekuatan Emas

Standar Amerika Karat	Standar Eropa Per- Ribuan	Kadar Emas Presentase
24	0,999	99,99%
23	0,958	95,83%
22	0,916	91,66%
21	0,875	87,50%
20	0,833	83,33%
19	0,792	79,16%
18	0,750	75,00%
17	0,708	70,83%
16	0,666	66,66%

Dalam penaksiran emas, penaksir terlebih dahulu menganalisa emas yang digadaikan oleh nasabah dengan analisa sebagai berikut:

- Analisa fisik yaitu melihat tampilan emas dan di timang-timbang.
- Analisa Kimia yaitu menggunakan air uji dan jarum uji.

- Analisa Berat Jenis Yaitu dengan menggunakan timbangan untuk mengukur berat kering dan berat basah emas.³⁰

Kemudian penaksir memerlukan alat pembantu untuk menaksir emas. Alat-alat yang diperlukan dapat dilihat di table dibawah ini:

Table. IV. IV

Alat pembantu menaksir emas dan jenis dan fungsinya.³¹

No	Nama	Jenis/Standar	Fungsi
1	Masker	Kedokteran	Melindungi diri dari uap air uji
2	Sarung Tangan	Kedokteran	Melindungi tangan dari percikan air uji
3	Baker Glass	Peralatan Kimia	Menampung air uji sebelum di campur ke tabung reaksi.
4	Tabung Reaksi	Peralatan Kimia	Tempat mencampur air uji.
5	Pipet	Peralatan Kimia	Untuk membantu akurasi jumlah air uji yang dimasukkan.
6	Kertas Hisab	Umum	Membersihkan air uji.
7	Botol Air Uji	Peralatan Emas	Tempat menyimpan air uji emas.
8	Air Uji (HCL)	Kimia/Atam	Salah satu cairan untuk menguji emas.
9	Air Uji (HNO3)	Kimia/Antam	Salah satu cairan untuk menguji emas
10	Batu Uji (HNO3)	Peralatan Emas	Sebagai tempat untuk menggores emas dalam analisa kimia.
11	Timbang	Peralatan Emas	Menimbang berat emas (kering ataupun basah).
12	Bejana Air	Umum	Wada air dalam proses menimbang berat basah emas.
13	Senar Pancing	Umum/Kecil	Mengikat barang dalam proses

³⁰ Fitri Tanjung, *loc. Cit.*

³¹ Dokumentasi, *loc. Cit.*

			menimbang berat basah.
14	Air	Umum	Media menimbang berat basah emas.
15	Batu apung/bata merah	Umum	Untuk membersihkan batu uji dari bekas uji emas.
16	Kikir/Cutter/Bor	Umum	Untuk menyayai atau melubangi emas yang dicurigai palsu.
17	Kemiri	Umum	Untuk melumasi permukaan batu uji agar lebih halus.
18	Loupe	10x	Melihat emas secara lebih detail.
19	Magnet	Umum	Megetes emas yang dicurigai berisi besi.
20	Jarum uji	Peralatan emas	Acuan warna dan kecepatan reaksi karatase emas.

Barang yang digadaikan pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Dumai hanya terpaku terhadap gadai emas. Di sini penulis memberi masukan terhadap pihak Bank, sebaiknya ada motivasi terhadap produk yang di tawarkan. Bisa gadai sepeda motor, mobil maupun surat-surat berharga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Dumai dapat disimpulkan bahwa :

1. Adapun Respon Nasabah terhadap Prosedur Akad Rahn pada PT Bank Syaria'h Mandiri cabang dumai adalah
 - Dengan adanya benar-benar menerapkan visi dan misi yang dimiliki bank tersebut. Selain itu, khususnya di bagian gadai belum sempurna melaksanakan tugasnya. Di karenakan kurangnya sosialisasi terhadap prosedur yang diterapkan ke pada nasabah.
2. Tatacara perhitungan biaya pada Akad Rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang dumai sebagai berikut:
 - Biaya yang dibebankan ke nasabah adalah biaya administrasi dan pemeliharaan.
 - Perhitungan biaya-biaya langsung dilakukan di depan nasabah.
 - Sosialisasi yang belum sempurna terhadap cara perhitungan biaya-biaya.
3. Barang yang bisa digadaikan dengan menggunakan akad rahn pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai adalah sebagai berikut:
 - Hanya emas yang bisa digadaikan di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
 - Emas yang diterima oleh bank adalah emas perhiasan dan emas batangan.

B. SARAN

Sebelum penulis mengakhiri, penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini.

Maka penulis menyarankan :

1. Selain meningkatkan visi dan misinya dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan presedur, Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai juga harus menyampaikan prosedur pembiayaan gadai yang lebih dimegerti oleh nasabah.
2. Barang yang digadaikan tidak hanya terpaku terhadap Emas saja, tetapi juga menambah barang yang bisa digadaikan di bank seperti kendaraan bermotor, mobildan surat berharga.
3. Disamping itu juga penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya sampai disini melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan yang melanjutkan penelitian ini khususnya penelitian yang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan usaha kecil dan kebutuhan sosial berdasarkan Akad rahn..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan M, Masail Fiqiyah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arthesa Ade, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bandung: Gramedia, 2008, Cet. Pertama.
- DEPAG RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Toha Putra, 1989.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
- Hamidi Luthfi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadi, 2003.
- Hosen, M. Nadrattuzaman, Dkk, Lembaga Bisnis Syariah, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2006, cet. Kedua.
- Karim, Adiwarmanto, Bank Islam, Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nurhayati Sri, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Prodjodikoro, Wiryono, Azas-Azas Hukum Perdata, Bandung: Sumur, 1993.
- Rivai Veithzal, Bank and Financial Institution Managemen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sholahuddin M, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zulkifli Sunarto, Panduan Praksi Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta : zikrul Hakim, 2003.

